

SKRIPSI

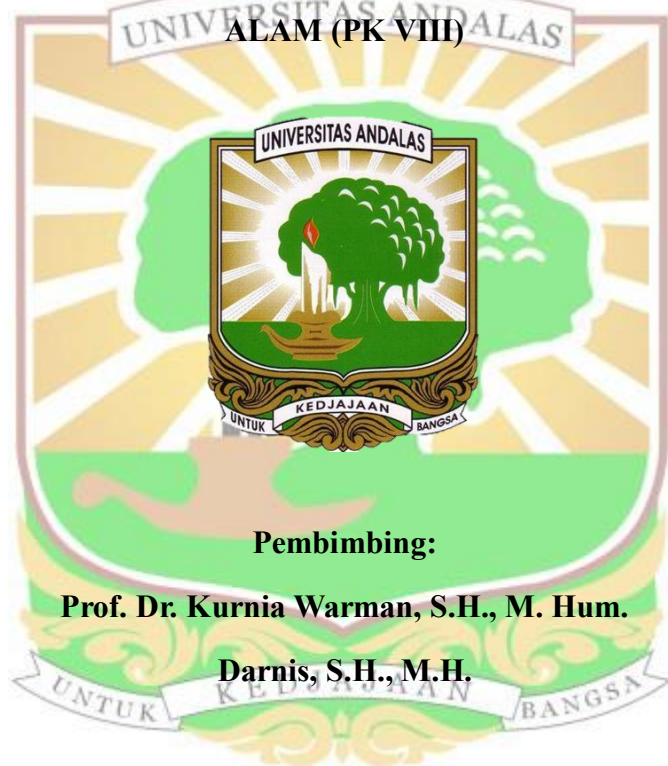
**TANGGUNG JAWAB KANTOR PERTANAHAN DALAM PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP**

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

HAIQAL DARIS BAMINDO
NIM 2110113099

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM AGRARIA DAN SUMBER DAYA
ALAM (PK VIII)**



Pembimbing:

Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M. Hum.

Darnis, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2026

	No. Alumni Universitas	Haikal Daris Bamindo	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Padang/ 23 Juni 2003 b. Nama Orangtua : Ishendri dan Daryenti c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam e. No. BP : 2110113099	f. Tanggal Lulus : 22 Juli 2026 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 4 Tahun 11 Bulan i. IPK : 3,85 j. Alamat : Jl Markisa Raya No 3, Kuranji, Padang	

TANGGUNG JAWAB KANTOR PERTANAHAN DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

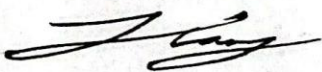
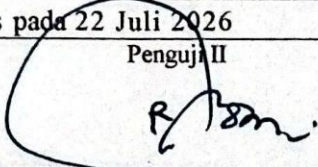
(Haikal Daris Bamindo, 2110113099, Program Kekhususan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 10 Halaman, 2026)

ABSTRAK

Pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang diadakan pemerintah dilakukan terus- menerus dalam rangka mendapatkan sertifikat hak atau tanah, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Untuk mewujudkan keinginan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, dibentuklah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Kantor Pertanahan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan program dari pelayanan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sistematis. Kantor Pertanahan sebagai pelaksana pelayanan ini harus bertanggung jawab apabila terjadi masalah tentang sertifikat tanah dikemudian hari. Namun, adanya perbedaan tahapan pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang membuat ketidaktertiban, ketidakpastian hukum, kesimpangsiuran dan kekacauan dalam peraturan perundang-undangan. Pada penulisan ini peneliti merumuskan dua rumusan masalah yang akan dibahas, pertama, *Bagaimana tanggung jawab kantor pertanahan dalam hal terjadi kerugian bagi seseorang atau badan hukum dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.* Kedua, *Apa sajakah dampak yang timbul dari permasalahan tanah dengan melibatkan kantor pertanahan pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.* Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama adanya inkonsistensi pengaturan pendaftaran tanah antara Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menimbulkan disharmonisasi yang ketidaktertiban pada pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali. Kedua, dampak dari inkonsistensi dapat menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian dari sistem perundang-undangan.

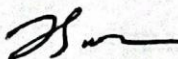
Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pendaftaran Tanah, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 22 Juli 2026

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
		
Haikal Daris Bamindo	Dr. Syofiarti, S.H., M.Hum.	Romi, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara: **Hendria Fithrina, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:



No. University Alumni	Haikal Daris Bamindo	No. Faculty Alumni
a. Place/Date of Birth : Padang/June 23 rd 2003	f. Graduation Date : July 22 nd 2026	
b. Parent's Name : Ishendri and Daryenti	g. Pass Predicate : Cumlaude	
c. Faculty : Law	h. Length of Study : 4 years 11 Months	
d. Concentration : Agrarian and Natural Resources Law	i. GPA : 3,85	
e. Student ID : 2110113099	j. Address : Jl Markisa Raya No. 3, Kurangi, Padang	

THE RESPONSIBILITY OF THE LAND OFFICE IN THE IMPLEMENTATION OF COMPLETE SYSTEMATIC LAND REGISTRATION
(Haikal Daris Bamindo, 2110113099, Agrarian and Natural Resources Law, Faculty of Law, Andalas University, 105 pages, 2026)

ABSTRACT

Land registration is an ongoing government initiative aimed at issuing land title certificates, as regulated by Government Regulation No. 24 of 1997. To fulfill the provisions of Article 19 of Law No. 5 of 1960, the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the Land Office issued Regulation No. 6 of 2018 on Comprehensive Systematic Land Registration. Comprehensive Systematic Land Registration is a program for the systematic initial registration of land. As the implementing agency for this service, the Land Office must be held accountable should any issues regarding land certificates arise in the future. However, differences in the implementation stages of initial land registration have led to disorder, legal uncertainty, confusion, and chaos within the regulatory framework. In this paper, the researcher formulates two research questions to be discussed: First, what is the responsibility of the Land Office in the event of losses incurred by an individual or legal entity during the implementation of the Comprehensive Systematic Land Registration? Second, what are the impacts arising from land-related issues involving the Land Office in the Comprehensive Systematic Land Registration? This study employs a normative legal method using a descriptive legislative and conceptual approach. The research findings indicate that, first, inconsistencies in land registration regulations between Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency No. 6 of 2018 and Government Regulation No. 24 of 1997 have led to disharmony and disorder in the implementation of initial land registration. Second, the impact of these inconsistencies can lead to disorder and uncertainty within the legal system

Keywords: Responsibility, Land Registration, Comprehensive Systematic Land Registration.

This minor thesis has defended in front of the examiner team at July 22nd 2026.

Signature	Examiner I	Examiner II
Haikal Daris Bamindo	Dr. Syofiarti, S.H., M.Hum.	Romi, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of Department of Administrative Law: **Hendria Fithrina, S.H., M.H.**

Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: